



LAPORAN

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
(RUMAH NEGARA, TANAH NEGARA DAN KENDARAAN DINAS)

PENDAHULUAN

1. Umum
Tugas dilaksanakan dalam rangka memenuhi Target Kinerja B-06 pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Maksud dan Tujuan
Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik.
3. Dasar
Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan berpedoman kepada :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533).
 2. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Dinas).

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kegiatan pengelolaan dilaksanakan berkelanjutan dan terus menerus namun evaluasi pelaksanaan dilaporkan pada trimester kedua Tahun Anggaran berjalan sebagai bagian dari Target Kinerja B-06 pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan tindaklanjut dari hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara yang dilaporkan setiap akhir bulan Maret kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) serta sebagai data dukung penyusunan Laporan BMN Semester I , meliputi seluruh lokasi Tanah dan Bangunan Rumah Negara serta seluruh Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.
2. Pembahasan
Telah dilaksanakan transfer keluar 4 kendaraan dinas kepada beberapa Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta antara lain:

No	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Nomor BAST
1	Bapas Kelas I Yogyakarta	Kijang LF 80 2001	AB 1950 UA	W14.PB.05.01-667, 2 Februari 2022
2	Bapas Kelas II Wonosari	Kijang Super 2001	AB 1859 UA	W14.PB.05.01-664, 24 Januari 2022
3	LPKA Kelas II Yogyakarta	-Vios 2007 -Kijang Super 2003	AB 58 AB 1934 UA	W14.PB.05.01-665, 24 Januari 2022
4	Rupbasan Kelas II Bantul	Kijang Super 2003	AB 1712 UA	W14.PB.05.01-666, 26 Januari 2022

Telah dilaksanakan evaluasi dan pembaruan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta dengan ketentuan penanggungjawab adalah Pejabat Struktural Eselon II dan III yang namanya tercantum dalam Surat Izin Penghunian (SIP). Pembaruan dilakukan terhadap Surat Izin Penghunian (SIP) yang penghuni sebelumnya memperoleh mutasi jabatan diluar atau pejabat baru yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta atau sudah pensiun dalam jabatannya. Pada semester I Tahun 2022 ini terdapat 3 Rumah Negara yang diperbaharui Surat Izin Penghunian (SIP), antara lain: Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta.

PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas Target Kinerja B-06 pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

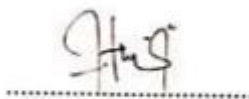
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal Juni 2022

Pelaksana Kegiatan :

1. Ika Irawati Andayani, S.E
NIP 198701242009122004



2. Dwi Endah Ariestanti
NIP 198004102009012005



3. Halim Surya Adhi Pratama. P
NIP 198802242007031001



Mengetahui,
Ka. Sub Bag. Pengelolaan
Keuangan dan BMN



Yudi Arto
NIP 197506101997031001

